



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kota Probolinggo
Nomor Registrasi: -



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

NOBITA BIKIN PANGLING

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (dinkes_iga)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Martina Aida Kuswardani

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

Landasan Hukum Imunisasi Di Indonesia

Imunisasi merupakan hak yang harus dipenuhi :

a. UUD 1945

- Pasal 28 B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.

b. UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

- Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

c. UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2014

- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- Pasal 44 ayat 2 : Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi,
- Pasal 44 ayat 3 : Pihak Keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus mendukung imunisasi bayi dan anak,
- Pasal 86 ayat 1 : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular,
- Pasal 89 ayat 1 : Kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dilakukan antara lain melalui pemberian kekebalan (imunisasi).

2. Permasalahan

Pemberian imunisasi dasar lengkap dilaporkan mengalami penurunan di dunia. Data dari World Health Organization (WHO) dilaporkan ada 68 negara pelayanan mengalami kendala dalam pemberian imunisasi dan mempengaruhi 80 juta anak dibawah usia 1 tahun (WHO, 2020). Adapun negara tersebut adalah New York sebanyak 63%, California sebanyak 40%, Ohio sebanyak 45%, Virginia sebanyak 45,7% dan di Inggris sebanyak 19,7%. Jumlah kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) akan meningkat jika banyak anak

dalam suatu populasi banyak yang tidak diimunisasi dan selanjutnya dapat menyebabkan kekebalan populasi menurun (Yoselina, Neherta and Fajria, 2023).

Data UNICEF di Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun diperkirakan 480.000 bayi meninggal sebelum usia satu tahun. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari 194 negara anggota World Health Organisation (WHO), 65 diantaranya memiliki cakupan imunisasi Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT) dibawah target global 90%. Diperkirakan diseluruh dunia pada tahun 2013, 1 dari 5 anak atau sekitar 21,8 juta anak tidak mendapatkan imunisasi yang bisa menyelamatkan nyawa mereka (Wahyuni and Prasetya, 2020).

Data dari Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjukkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terhitung sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap status imunisasinya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Imunisasi dasar lengkap (IDL) di Kecamatan Kedopok mencapai 64.27 % dan perlu ditingkatkan hingga mencapai target 93% ditahun 2023. Universal Child Immunization (UCI) di Kecamatan Kedopok sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 cenderung menurun dari 99,01 % pada tahun 2021 menjadi 64,27 % pada tahun 2023. Pada tahun 2023 cakupan desa/kelurahan UCI, sebanyak 421 bayi se Kecamatan Kedopok, tersebar di 6 Kelurahan dengan cakupan antara 36,27% - 95,77%, Kelurahan yang cakupannya masih dibawah rata rata adalah Kelurahan Kedopok, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Kareng Lor.

Menurut hasil laporan bulanan imunisasi sampai bulan April 2024 mencapai 21,05 % - 30,95 % di UPTD Puskesmas Kedopok. Cakupan terendah di Kelurahan Sumber Wetan dengan IDL 21,05 %. Menurut petugas Puskesmas setempat ternyata cakupan imunisasi pada bayi memang rendah dikarenakan banyak masyarakat berpindah - pindah tempat tinggal dan melakukan imunisasi ditempat lain, selain itu menurut petugas puskesmas setempat masih adanya masyarakat yang menolak adanya imunisasi, karena ibu mempunyai keyakinan imunisasi membuat anak menjadi demam, rewel, dan kejang sehingga anak tidak perlu imunisasi, terutama setelah mendapat imunisasi DPT.

Penurunan cakupan IDL tersebut menjadikan Kota Probolinggo, terutama Kecamatan Kedopok, Kelurahan Sumber Wetan beresiko terhadap tingginya kasus PD3I. Karena Cakupan IDL Kecamatan Kedopok rendah, inovasi yang dikenal dengan **NOBITA PANGLING BIKIN** (Nonton Bareng Ibu Balita Bikin Posyandu Tidak Perlu Keliling) bertujuan untuk mengenalkan pada Ibu Balita akan bahayanya PD3I pada Balita jika tidak mendapatkan Imunisasi Lengkap.

Program ini merupakan Kerjasama berbagai pihak melalui kemitraan antara UPTD Puskesmas Kedopok, Lintas Sektor dan Tokoh Masyarakat.

3. Isu Strategis

Isu strategis imunisasi berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak dan mencegah penyebaran penyakit. Beberapa isu strategis imunisasi di antaranya: Meningkatkan partisipasi masyarakat, Meningkatkan dukungan pemerintah daerah, Meningkatkan akses informasi tentang imunisasi, Meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi, Meningkatkan sumber daya untuk mendukung imunisasi.

Strategi Komunikasi Nasional memiliki tujuan untuk mendukung dan mendorong pemanfaatan layanan imunisasi rutin secara tepat dengan:

- Mengatasi keraguan tentang imunisasi yang mungkin timbul karena adanya kekhawatiran tentang keamanan, dan efektivitas imunisasi akibat berbagai mitos dan kesalah pahaman lain;
- Memberi informasi tentang potensi risiko dan meredakan krisis yang tidak diinginkan selama pelaksanaan program imunisasi.

4. Metode Pembaharuan

Sebelum adanya inovasi masyarakat belum mengerti apa yang di maksud dengan PD3I dan bahaya tentang PD3I, sehingga menganggap bahwa imunisasi tidak terlalu penting.

Setelah adanya Inovasi Masyarakat mulai mendapatkan informasi apa sebenarnya itu PD3I dan penting nya imunisasi serta bahayanya jika balita tidak di berikan imunisasi secara lengkap. yang terjadi sebenarnya di suatu daerah. Informasi ini didapatkan melalui film yang bertemakan PD3I, Inovasi ini memberikan dampak positif bagi Masyarakat untuk mengetahui seperti apa bahayanya PD3I sebenarnya.

5. Keunggulan dan Kebaharuan

Ide utama dari program/ inovasi ini adalah memberikan akses pelayanan yang mudah terjangkau, berkualitas, setara, merata bagi Masyarakat dengan cara menonton bareng tentang kasus PD3I di posyandu Bersama ibu balita dan memberikan tips bagaimana cara penanganan bayi setelah imunisasi terhindar dari panas, tanya jawab dengan ibu balita seputar cara penanganan PD3I

Melalui NOBITA BIKIN PANGLING, diharapkan Petugas Puskesmas dan kader Posyandu tidak perlu door to door untuk menjelaskan pentingnya imunisasi dan bahayanya akan penyakit PD3I dan Ibu balita dengan senang hati memberikan hak anak untuk mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap.

6. Tahapan Inovasi

Tahapan atau cara menjalankan ide inovasi tersebut mulai dari awal sehingga di peroleh perubahan yang diinginkan :

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Tercapainya Imunisasi IDL 100%
2. Pelayanan Imunisasi cukup diberikan di Puskesmas, Pustu, Posyandu, tanpa ada penolakan jika terpaksa harus swiping
3. Tercapainya Masyarakat yang peduli akan pentingnya Imunisasi dan akan bahaya PD3I

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

1. Memberikan Informasi apa itu PD3I dan bahayanya
2. Merubah pola pikir Ibu balita, bahwa Imunisasi hak anak untuk menjadi sehat
3. Masyarakat terhindar dari penyakit potensial KLB

Keuntungan yang didapat sesudah Inovasi

1. Petugas tidak perlu swiping untuk memberikan imunisasi (jika terpaksa swiping tidak ada penolakan)
2. Di setiap posyandu ibu balita hadir bukan hanya sekedar untuk timbang saja, tapi ibu balita dengan senang hati itu melakukan imunisasi tanpa ada pemaksaan
3. Di setiap posyandu ibu balita aktif bertanya mengenai perkembangan anaknya.

1.13. Hasil Inovasi

Program/ inovasi ini berdampak signifikan terutama dalam tercapainya keberhasilan Imunisasi. Berdasarkan evaluasi dari NOBITA BIKIN PANGLING terdapat peningkatan, berikut data perbandingannya berdasarkan data hasil Aplikasi Imunisasi pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Dampak Inovasi :

1. Capaian Imunisasi IDL total khusus wilayah Sumber wetan dan IDL total wilayah kerja Puskesmas Kedopok juga meningkat;
2. Kegiatan penyuluhan tentang PD3I baik di orang tua maupun pendamping (suami, nenek, bibi, dsb) balita mendapat respon positif dan bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi suatu kebutuhan tiap kali posyandu;
3. Koordinasi dengan kader posyandu dan Masyarakat semakin solid dan bertambah aktif untuk datang ke posyandu;
4. Linsek (kelurahan dan TP PKK Kelurahan) ikut aktif diposyandu;
5. Linsek Kecamatan mendapatkan respon baik dan mendukung kegiatan Inovasi serta hadir rutin di posyandu;
6. Posyandu lebih aktif dan ramai sehingga bisa di prioritaskan mendukung program Nasional di bidang Kesehatan yakni pemantauan Kesehatan menurut klister.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

05-06-2024

1.15. Waktu Implementasi

02-09-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-7.778230759696908, 113.21278782483895

1.21. Kematangan

89.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	• PENETAPAN INOVASI DAERAH • PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN INOVASI NOBITA BIKIN PANGLING • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN INOVASI NOBITA BIKIN PANGLING • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN • PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN • VERIFIKASI SINYAL/ PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI (PE)/ PELACAKAN KONTAK PENYAKIT BERPOTENSI KLB • Pengelolaan Surveilans Kesehatan
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja secara elektronik	• TIK TOK NOBITA • FB NOBITA • IG NOBITA • WEB NOBITA

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA INOVASI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN • PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA INOVASI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN • SERTIFIKAT
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN INOVASI NOBITA BIKIN PANGLING • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	• REPLIKASI INOVASI DAERAH • REPLIKASI INOVASI DAERAH • REPLIKASI INOVASI DAERAH
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	• ALUR PELAYANAN NOBITA BIKIN PANGLING
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	• PENETAPAN INOVASI DAERAH • PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN INOVASI NOBITA BIKIN PANGLING • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• TIK TOK NOBITA • FB NOBITA • IG NOBITA • WEB NOBITA • Alamat email
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• PENGADUAN
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Minilokakarya Lintas Sektor • Minilokakarya Lintas Sektor • PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN INOVASI NOBITA BIKIN PANGLING • TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP NOBITA BIKIN PANGLING
15.	Layanan Terintegrasi	1	• INOVASI DI KEGIATAN POSYANDU • HASIL KEGIATAN
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• PROPOSAL NOBITA
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• LAPORAN AKHIR KAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS INOVASI DAERAH UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO YANG BERKELANJUTAN • LAPORAN EVALUASI EXTERNAL • IKM SEMESTER 2 TAHUN 2023 • IKM SEMESTER 1 TAHUN 2023
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	• WEB • FB • IG • TIK TOK
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• NOBITA BIKIN PANGLING
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	(untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png		
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia